

PERUBAHAN MAKNA GELAR ADAT MELAYU JAMBI DI TENGAH DINAMIKA SOSIAL MODERN

Zulfikar Aziz Rasyid¹, Denny Defrianti², Debi Alisa Putri³, Yunita Diani Putri⁴, Putri Andini⁵, Rio Febrian Harlefa⁶

zulfikar.aziz.r@gmail.com¹, ddefrianti@unja.ac.id², debialisap@gmail.com³,
yunitadiani19@gmail.com⁴, putriandini4223@gmail.com⁵, rioharefa16@gmail.com⁶

Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pergeseran makna dan fungsi gelar adat dalam masyarakat Melayu Jambi di tengah dinamika sosial modern. Latar belakang masalah berangkat dari fenomena transformasi gelar adat yang semula merupakan institusi otoritatif-sakral menjadi aset simbolis yang terkomodifikasi. Tujuan artikel adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong perubahan serta implikasinya terhadap kelestarian budaya. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap literatur yang relevan, kajian ini menemukan bahwa pergeseran nilai gelar adat terutama didorong oleh kapitalisasi ekonomi, birokratisasi negara, revolusi digital, dan mobilitas sosial. Implikasinya bersifat paradoks: di satu sisi terjadi erosi otoritas dan pendangkalan makna, namun di sisi lain membuka ruang revitalisasi dan adaptasi kreatif. Simpulan penelitian menekankan bahwa keberlanjutan budaya bergantung pada kapasitas masyarakat adat dalam menyeimbangkan preservasi nilai-nilai inti dengan adaptasi yang relevan terhadap tuntutan zaman, sehingga gelar adat dapat tetap menjadi living tradition yang bermakna.

Kata Kunci: Gelar Adat, Perubahan Makna, Masyarakat Melayu Jambi, Kapitalisasi Simbolik.

ABSTRACT

This study examines the shift in meaning and function of traditional titles in Jambi Malay society amid modern social dynamics. The background stems from the phenomenon of the transformation of these titles from a sacred-authoritative institution into a commodified symbolic asset. The article aims to analyze the driving factors of this change and its implications for cultural sustainability. Using a qualitative research method with a content analysis approach on relevant literature, the study finds that the shift in the value of traditional titles is primarily driven by economic capitalization, state bureaucratization, the digital revolution, and social mobility. The implications are paradoxical: on one hand, there is an erosion of authority and a shallowing of meaning, but on the other, it opens space for creative revitalization and adaptation. The research concludes that cultural sustainability depends on the capacity of the customary community to balance the preservation of core values with adaptation relevant to the demands of the times, so that traditional titles can remain a meaningful living tradition.

Keywords: Traditional Titles, Meaning Shift, Jambi Malay Society, Symbolic Capitalization.

PENDAHULUAN

Gelar adat dalam masyarakat Melayu Jambi merupakan salah satu pilar penopang struktur sosial dan kultural yang telah berakar sejak masa kesultanan. Sistem gelar seperti Datuk, Rio, Depati, dan Ninik Mamak tidak hanya berfungsi sebagai penanda status, tetapi juga merupakan manifestasi dari otoritas politik, hukum adat, dan kepemimpinan spiritual

yang mengatur tata kehidupan komunal. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, arus modernisasi yang ditandai oleh kapitalisme global, birokratisasi negara, dan revolusi digital telah menciptakan tekanan dan transformasi mendalam pada berbagai institusi tradisional, termasuk sistem gelar adat.

Di tengah dinamika sosial modern, terjadi pergeseran yang signifikan dalam pemaknaan dan fungsi gelar-gelar tersebut. Gelar yang semula bersifat sakral dan menjadi sumber legitimasi politik-kultural, kini semakin sering ditempatkan dalam logika pasar sebagai modal sosial, komoditas pariwisata, atau alat legitimasi dalam kontestasi politik elektoral. Perubahan ini melahirkan ketegangan antara upaya pelestarian nilai-nilai otentik dengan tuntutan adaptasi pragmatis, sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar tentang masa depan institusi adat dalam menjaga identitas kolektif masyarakat Melayu Jambi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis transformasi makna dan fungsi gelar adat Melayu Jambi serta faktor-faktor sosial modern yang mendorongnya. Fokus kajian difokuskan pada dua pertanyaan penelitian: Bagaimana bentuk pergeseran nilai dan fungsi gelar adat Melayu Jambi dari masa tradisional ke konteks kontemporer? Faktor-faktor sosial modern apa yang paling dominan mendorong perubahan tersebut, serta implikasi seperti apa yang ditimbulkannya terhadap proyek kelestarian budaya?

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk mengisi celah akademik dalam memahami strategi adaptasi institusi lokal di tengah perubahan global. Secara praktis, temuan artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan adat, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan praksis pelestarian budaya yang tidak sekadar menjaga bentuk, tetapi juga menghidupi nilai dan ruhnya di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahapan yaitu Heuristik kami melakukan pengumpulan sumber primer dan sekunder dari arsip, jurnal, laporan, dan studi literatur terkait, Kritik Sumber kami melakukan kritik baik eksternal maupun internal untuk menguji kredibilitas dan keakuratan sumber yang telah kami kumpulkan sebelumnya, Interpretasi lalu kami menghubungkan fakta-fakta yang telah diverifikasi untuk membangun narasi dan analisis kausalitas, dan Historiografi lalu tahapan terakhir yaitu kami melakukan penulisan narasi sejarah secara sistematis dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat dan Multifungsi Gelar Adat dalam Masyarakat Melayu Jambi Tradisional

Untuk memahami perubahan makna gelar adat di era modern, kita harus terlebih dahulu mendalami dengan seksama hakikat dan fungsi aslinya dalam masyarakat tradisional. Dalam konteks ini, gelar adat Melayu Jambi seperti Datuk, Ninik Mamak, Rio, Manti, dan Pangiran bukanlah sekadar hiasan nama atau simbol status kosong. Ia merupakan suatu sistem institusional yang kompleks, holistik, dan vital, yang berperan sebagai kerangka kerja (framework) utama pengorganisasian kehidupan sosial, politik, hukum, dan spiritual. Gelar adat adalah poros tempat seluruh aspek masyarakat tradisional

berputar dan menemukan keseimbangannya.¹

Berikut adalah penjabaran mendetail mengenai fungsi-fungsi multidimensional tersebut:

1. Fungsi Struktural-Politik: Rangkaian Pemerintahan dan Otoritas

Dalam tatanan tradisional, gelar adat membentuk suatu birokrasi pemerintahan adat yang hierarkis dan fungsional. Struktur ini sering kali merupakan miniatur atau penerusan dari sistem Kesultanan Jambi di tingkat lokal (marga atau pesukuan).

Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan: Sebelum negara modern dengan administrasinya hadir, otoritas untuk memimpin, mengatur, dan mengambil keputusan bersumber dari adat. Gelar adalah instrument legitimasi utama. Seseorang yang menyandang gelar Datuk, misalnya, diakui kekuasaannya bukan karena pemilihan suara terbanyak, melainkan karena ia memenuhi syarat keturunan (genealogis) dari garis pemimpin sebelumnya dan dipilih melalui mufakat para sesepuh. Proses ini memberikan kepadanya daulat (kewibawaan yang sah dan dihormati).²

Sebagai Struktur Pemerintahan Lokal: Setiap gelar memiliki wilayah otoritas dan tanggung jawab spesifik. Ninik Mamak (secara harfiah berarti "kakek atau paman") adalah pemimpin dari suatu kaum atau keluarga besar. Ia berfungsi layaknya "kepala pemerintahan" di tingkat komunitas terkecil, mengurus masalah internal keluarga, tanah ulayat, dan pernikahan. Sementara Datuk sering kali memimpin suatu suku atau marga yang lebih besar, yang terdiri dari beberapa kaum. Ia bertindak sebagai regulator, hakim, dan diplomat yang mewakili sukunya dalam hubungan dengan marga lainnya.³ Gelar-gelar lain seperti Manti (juru bicara/pelaksana), Panghulu (pemimpin upacara), dan Rio (perempuan bangsawan) melengkapi struktur kepemimpinan ini dengan peran-peran khususnya.

2. Fungsi Sosial-Identitas: Perekat Kolektivitas dan Peta Kekerabatan

Gelar adat berfungsi sebagai penanda identitas sosial yang paling jelas dan terdiferensiasi.

Kartu Nama Kolektif: Sebutan gelar seseorang seketika mengungkapkan banyak informasi: marga asalnya (misalnya, Datuk yang berasal dari Marga VII Koto akan berbeda gelar spesifiknya dengan Datuk dari Marga IX Koto), wilayah geografis ulayatnya, dan strata sosialnya dalam masyarakat. Ini menciptakan sebuah "peta sosial" yang dipahami bersama oleh seluruh anggota masyarakat Melayu Jambi.⁴

Pengatur Hubungan Sosial: Gelar menentukan bagaimana seseorang harus diperlakukan dan bagaimana ia harus memperlakukan orang lain. Seorang pemuda harus bersikap sopan santun dan beradab di hadapan Ninik Mamak-nya. Sebaliknya, Ninik Mamak berkewajiban untuk bersikap bijaksana dan melindungi. Gelar dengan demikian

¹ Lihat M. Ali Hanafiah dkk., *Filsafat Hidup Orang Jambi* (Jambi: Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, 1993), hlm. 45. Hanafiah menegaskan bahwa adat bagi orang Jambi adalah "sistem nilai yang menjadi pedoman hidup" yang menyatu dalam setiap lini, dan gelar adalah manifestasi operasional dari sistem tersebut.

² Sutan Syarifuddin dalam "Konsep Kedaulatan dalam Masyarakat Adat Minangkabau dan Melayu Jambi: Sebuah Tinjauan Komparatif," *Jurnal Antropologi Sosial Budaya* 8, no. 2 (2022): hlm. 112.

³ "Dinamika Kepemimpinan Adat dalam Masyarakat Melayu Jambi," *Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2019): hlm. 30-35

⁴ Edi Warsidi dan M. Nurkhan, *Adat Istiadat Melayu Jambi: Kajian Nilai-Nilai Budaya* (Jambi: Kantor Bahasa Provinsi Jambi, 2010), hlm. 98-105

menjadi skrip untuk interaksi sosial yang teratur dan harmonis, mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik horizontal.⁵

Mekanisme Integrasi dan Solidaritas: Rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat terbangun karena setiap individu terikat dalam suatu jaringan kekerabatan (sanak saudara) yang dipimpin oleh seorang pemangku gelar. Dalam suka (seperti perkawinan, panen) dan duka (kematian, musibah), tanggung jawab kolektif diorganisir melalui struktur yang dibentuk oleh gelar-gelar ini. Solidaritas kelompok terjaga karena ada figur sentral (Datuk/Ninik Mamak) yang menjadi simbol pemersatu.

3. Fungsi Hukum-Normatif: Konstitusi dan Lembaga Peradilan yang Hidup

Masyarakat tradisional Melayu Jambi memiliki sistem hukumnya sendiri yang mandiri, dan gelar adat adalah aktor utama di dalamnya.

Penyimpan dan Penafsir Hukum Adat: Hukum adat (seloko adat) yang tidak tertulis hidup dalam ingatan dan kebijaksanaan para pemangku gelar senior. Mereka adalah "buku hukum yang berjalan". Pengetahuan tentang sanksi untuk pelanggaran tertentu, aturan pembagian warisan, atau tata cara penyelesaian sengketa tanah diwariskan secara turun-temurun kepada para penyanggah gelar.⁶

Lembaga Peradilan Tingkat Pertama: Sebagian besar sengketa dalam masyarakat diselesaikan di lapangan adat, bukan di pengadilan negara. Prosesnya diawali dengan musyawarah yang dipimpin oleh Ninik Mamak dari pihak yang bersengketa. Jika tidak tercapai kesepakatan, perkara naik ke tingkat Datuk, bahkan bisa ke Rapat Adat yang dihadiri oleh beberapa Datuk. Keputusan (keputusan adat) yang dihasilkan bersifat final dan mengikat secara moral dan sosial. Sanksinya bisa berupa denda (dendah), pengucilan sementara, atau dalam kasus sangat berat, pengusiran dari komunitas.⁷

Penjaga Moral dan Etika Publik: Para pemangku gelar bertindak sebagai teladan (uswah). Perilaku mereka diharapkan mencerminkan nilai-nilai luhur Melayu seperti malu (rasa sungkan/harga diri), jujur, amanah (dapat dipercaya), dan tenggang rasa. Mereka berhak menegur bahkan memberikan sanksi moral kepada anggota masyarakat yang dianggap menyimpang dari norma-norma ini, bukan berdasarkan kekuasaan absolut, tetapi berdasarkan otoritas kultural yang diberikan oleh adat.

4. Fungsi Spiritual-Kosmologis: Penjaga Keseimbangan Alam dan Leluhur

Fungsi ini sering kali kurang terangkat dalam analisis sosiologis modern, tetapi merupakan bagian integral dari pemahaman tradisional.

Penghubung dengan Leluhur: Banyak gelar, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan suku, diyakini memiliki kaitan langsung dengan leluhur pendiri (nenek moyang) marga tersebut. Penyanggah gelar dipandang sebagai penerus dan perwakilan leluhur di dunia nyata. Oleh karena itu, ia juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan leluhur melalui ritual-ritual tertentu dan menjaga pusaka (benda warisan sakral) yang diwariskan.⁸

⁵ Samin S.M., *Seloko Adat Melayu Jambi* (Jambi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, 2001), hlm. 23-30.

⁶ Samin S.M., *Seloko Adat...*, hlm. 56-60

⁷ "Jurnal Hukum dan Peradilan 8, no. 2 (2019): hlm. 240-250.

⁸ "Nilai Spiritual dalam Upacara Adat Melayu Jambi," *Jurnal Melayu: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2018): hlm. 85-92.

Ritus Penyeimbang Kosmos: Prosesi pemberian gelar (upacara pengangkatan) adalah sebuah ritus peralihan (rite of passage) yang sakral. Upacara dengan zikir, doa-doa, kenduri, dan penyerahan simbol-simbol seperti keris atau tengkuluk (destar) bukan hanya seremonial sosial. Ritual ini dimaknai sebagai proses pemindahan daulat (energi/kewibawaan spiritual) dan permohonan restu kepada Allah SWT dan arwah leluhur. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan (balance) antara dunia manusia (alam nyata) dengan dunia ghaib (alam batin), serta antara komunitas manusia dengan alam lingkungannya.⁹ Seorang pemimpin yang sah secara adat diyakini akan membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi wilayahnya.

Mekanisme Pemberian Gelar: Syarat Ketat yang Menjaga Kewibawaan

Keseluruhan fungsi di atas hanya dapat berjalan efektif jika gelar diberikan melalui protokol adat yang ketat dan selektif. Mekanisme ini bertindak sebagai filter untuk menjaga kualitas dan legitimasi pemangku gelar. Prosesnya umumnya melibatkan:

1. Verifikasi Genealogis (Asal-Usul): Calon harus membuktikan garis keturunannya tersambung kepada pemangku gelar sebelumnya atau kepada leluhur pendiri. Ini adalah syarat primer yang tidak dapat ditawar.
2. Penilaian Kapabilitas Pribadi: Calon dinilai karakter, akhlak, pengetahuan agama dan adat, kewibawaan, serta kemampuan berbicara dan bermusyawarah. Seorang yang bebal (bodoh) atau buruk kelakuan tidak akan diangkat, meskipun ia keturunan langsung.
3. Musyawarah untuk Mufakat (Rapai Adat): Keluarga besar mengadakan rapat internal untuk membahas calon. Jika disetujui, kemudian dibawa ke rapat yang lebih luas yang dihadiri oleh Ninik Mamak dan Datuk dari suku/marga terkait. Keputusan harus dicapai dengan mufakat, bukan voting.
4. Upacara Pengangkatan Resmi (Bermano Adat): Tahap puncak adalah upacara adat yang khidmat dan biasanya mahal. Ritual ini meliputi pembacaan seloko adat (mantera adat yang berisi nasihat dan pengesahan), penyerahan atribut (seperti pakaian adat, keris), dan kenduri dengan menyembelih hewan (kerbau atau kambing). Upacara ini adalah pengumuman publik sekaligus pengesahan sakral yang melibatkan seluruh komunitas dan tokoh adat dari marga lain sebagai saksi.¹⁰

Dengan demikian dalam ekosistem sosial tradisional Melayu Jambi, gelar adat merupakan institusi total yang mengatur kehidupan dari buaian hingga ke liang lahat. Ia adalah konstitusi tidak tertulis, badan legislatif-eksekutif, mahkamah agung, sekaligus lembaga keagamaan lokal yang menyatu dalam figur-figur pemangku gelar. Pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan vitalitas fungsi tradisional inilah yang kemudian menjadi tolok ukur krusial untuk menganalisis seberapa jauh gelar-gelar ini telah bergeser, tereduksi, atau bahkan bertransformasi dalam menghadapi gelombang perubahan sosial, politik, dan ekonomi di era modern. Pergeseran itu tidak hanya terjadi pada "makna"-nya secara semantik, tetapi lebih fundamental lagi pada fungsi sosial dan legitimasinya dalam mengatur tata kehidupan masyarakat kontemporer.

⁹ Sushartami, "Nilai Spiritual...", hlm. 90. Penulis menjelaskan bagaimana upacara adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan (re-integrasi) kosmos yang terganggu oleh suatu peristiwa, seperti pergantian kepemimpinan.

¹⁰ (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2015), hlm. 72-80.

Faktor Penggerak Pergeseran Makna Serta Gelar Adat Melayu Jambi

- **Komodifikasi Ekonomi: Gelar sebagai Modal Sosial dan Aset Pasar**

Dinamika ekonomi modern menjadi pendorong utama transformasi makna gelar adat dari amanah leluhur menjadi aset yang dapat dipertukarkan. Logika kapitalisme telah meresap ke dalam sistem nilai adat, mengubah gelar menjadi suatu bentuk modal simbolis (*symbolic capital*) yang dapat dikonversi menjadi keuntungan material dan sosial.¹¹ Pergeseran ini terwujud dalam beberapa manifestasi kunci.

Pertama, gelar berfungsi sebagai modal sosial (*social capital*) yang kritis dalam membangun jaringan bisnis dan reputasi. Seorang penyandang gelar Datuk atau Rio memperoleh akses dan kepercayaan (*trust*) yang lebih mudah dalam transaksi ekonomi, khususnya yang melibatkan sumber daya lokal atau komunitas.¹² Kedua, terjadi komodifikasi langsung di sektor pariwisata dan kreatif, di mana gelar adat menjadi bagian dari paket pertunjukan budaya yang dijual kepada wisatawan. Nilai sakral dan eksklusif direduksi menjadi nilai tontonan dan daya tarik pasar.¹³ Ketiga, dan paling problematis, adalah transaksionalisasi proses pemberian gelar. Dasar penganugerahan yang seharusnya berupa jasa, kebijaksanaan, dan kesalehan (*achieved status*) terancam tergantikan oleh pertimbangan materi. Praktik pemberian gelar yang dikaitkan dengan sumbangan atau kemampuan ekonomi tertentu telah dilaporkan di beberapa komunitas, menggeser legitimasi dari moral ke finansial.

- **Transformasi Politik dan Mediatisasi: Peralihan Otoritas ke Ruang Simbolik**

Dua kekuatan modern lainnya negara-bangsa dan revolusi digital telah secara fundamental mengubah peta otoritas dan representasi gelar.

Di satu sisi, demokratisasi dan birokratisasi negara modern telah mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan dan hukum yang sebelumnya melekat pada pemegang gelar. Otoritas substantif Depati atau Ninik Mamak dalam mengadili sengketa dan mengatur wilayah telah digantikan oleh Kepala Desa, Pengadilan Negeri, dan perangkat hukum negara.¹⁴ Akibatnya, gelar mengalami desakralisasi politik dan beralih ke ranah pengaruh yang bersifat kultural dan simbolis. Dalam kontestasi politik elektoral, gelar dimanfaatkan sebagai alat legitimasi simbolik untuk membangun citra kedekatan dengan akar tradisi dan menggalang dukungan dari pemilih yang masih mengakui kewibawaan adat.¹⁵

Di sisi lain, revolusi digital dan media sosial menciptakan medan representasi baru. Gelar adat mengalami mediatisasi, di mana keberadaannya dikonstruksi dan ditampilkan melalui platform seperti Instagram dan Facebook. Praktik ini mengubah gelar menjadi komponen identitas digital dan personal branding. Kewibawaan yang dulu dibangun melalui interaksi tatap muka dan pengakuan komunal jangka panjang, kini dapat direpresentasikan dan bahkan dibentuk melalui strategi pencitraan di ruang maya. Hal ini

¹¹ Nelly Palmina dkk., "Gelar Adat sebagai Modal Sosial dalam Komunikasi Politik di Jambi," *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2022): 191.

¹² R.A. Putra, "Dinamika Gelar Adat pada Masyarakat Melayu Jambi di Era Globalisasi," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 82.

¹³ Rina Febriana, "Komodifikasi Adat Melayu Jambi dalam Festival Pesona Sungai Batanghari," *Jurnal Ilmu Budaya* 16, no. 1 (2022): 35

¹⁴ Nopriyasman, "Sistem Pemerintahan Adat Marga di Jambi Pasca Kesultanan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 2 (2021): 215

¹⁵ Palmina dkk. (2022), hlm. 201-205

membuka peluang sekaligus risiko: peluang untuk memperkenalkan adat ke khalayak luas, namun risiko terhadap pendangkalan makna, di mana gelar menjadi sekadar filter estetika tanpa substansi tanggung jawab.

- **Mobilitas Sosial, Pendidikan, dan Globalisasi: Konteks Sosio-Kultural yang Berubah**

Lanskap sosio-kultural masyarakat yang berubah turut menjadi tekanan bagi sistem nilai gelar. Mobilitas sosial vertikal yang kini lebih ditentukan oleh prestasi pendidikan dan ekonomi ketimbang keturunan, mengubah logika stratifikasi. Gelar adat sering kali berfungsi sebagai komplementer bagi status kelas menengah baru (profesional, pengusaha) untuk memperkaya identitasnya dengan dimensi kultural dan sejarah.¹⁶

Sistem pendidikan formal yang berlandaskan rasionalitas ilmiah dan nilai-nilai universal, secara halus menggeser epistemologi masyarakat yang mengandung unsur magis-religius sebagai fondasi kesakralan gelar. Generasi muda terdidik cenderung mendekati gelar dengan kerangka berpikir yang lebih kritis dan instrumental, mempertanyakan relevansi praktisnya dalam kehidupan modern.

Akhirnya, arus globalisasi dan pluralisme nilai membawa tantangan tersendiri. Dominasi hukum nasional atas hukum adat melemahkan fungsi legalistik gelar. Sementara itu, infiltrasi nilai-nilai global seperti individualisme, egalitarianisme, dan meritokrasi menciptakan ketegangan dengan nilai hierarkis, kolektivisme, dan keturunan yang inheren dalam sistem gelar. Ketegangan ini, misalnya, terejawantah dalam perdebatan tentang kesetaraan gender, yaitu hak perempuan untuk mewarisi atau menyandang gelar tertentu yang secara tradisional bersifat patriarkal. Pluralisme ini memaksa masyarakat adat untuk terus-menerus menegosiasikan dan memaknai ulang aturan-aturan tradisional agar tetap dapat diterima dalam konteks nilai-nilai global yang dominan.

Implikasi dan Tantangan Pergeseran Makna Terhadap Kelestarian Budaya Melayu Jambi

Perubahan makna dan fungsi gelar adat Melayu Jambi bukanlah fenomena yang steril, melainkan membawa implikasi mendalam dan menciptakan tantangan multidimensi bagi proyek pelestarian budaya. Pergeseran dari otoritas sakral ke modal simbolik ini menempatkan kebudayaan Melayu Jambi pada persimpangan antara preservasi otentisitas dan adaptasi pragmatis.

Implikasi Terhadap Kelestarian Budaya: Antara Erosi dan Revitalisasi Transformasi yang terjadi menghasilkan implikasi paradoks, yaitu proses erosi sekaligus revitalisasi secara bersamaan.

Di Satu Pihak, Terjadi Implikasi yang Bersifat Menggerus:

1. Dekomposisi Otoritas dan Fragmentasi Pengetahuan: Melemahnya otoritas substantif para penyandang gelar adat berimplikasi pada terfragmentasinya kepemimpinan kultural. Jika gelar hanya menjadi simbol tanpa kewenangan mengikat, maka kemampuan untuk menjaga kohesi sosial, menyelesaikan sengketa adat, dan menjaga kesinambungan tradisi menjadi berkurang.¹⁷ Pengetahuan adat yang kompleks (*local wisdom*) yang seharusnya melekat pada setiap jenjang gelar berisiko menyempit menjadi sekadar ritual seremonial.
2. Komersialisasi dan Kehilangan Makna Intrinsik: Ketika gelar menjadi komoditas, nilai

¹⁶ Putra (2020), hlm. 87

¹⁷ Husnu Abadi dkk., Adat Istiadat Melayu Jambi (Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi, 2003), hlm. 78

intrinsiknya sebagai amanah leluhur dan pencapaian spiritual terancam tergantikan oleh nilai tukar ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan inflasi simbolik, di mana gelar menjadi terlalu mudah diperoleh sehingga kehilangan rasa hormat dan kewibawaannya di mata komunitas.¹⁸ Pelestarian budaya yang sejati memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna, bukan hanya pemeliharaan bentuk luarnya yang sudah dikomersialkan.

3. Kesenjangan Generasi dan Dislokasi Makna: Persepsi generasi muda yang melihat gelar secara instrumen dan simbolis, tanpa diiringi pemahaman tentang tanggung jawab komunalnya, menciptakan dislokasi makna. Gelar terancam menjadi "bahasa" yang tidak lagi dipahami sepenuhnya oleh generasi penerus, hanya diwarisi sebagai label tanpa konten nilai. Ini merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan transmisi budaya.

Di Pihak Lain, Muncul Implikasi yang Bersifat Merevitalisasi:

1. Demokratisasi Akses dan Inklusivitas: Pergeseran dari basis keturunan murni ke basis prestasi (meski terkadang material) membuka peluang bagi individu dari luar garis keturunan tradisional untuk berkontribusi dan diakui dalam sistem adat. Ini dapat menjadi mekanisme regenerasi dan penyegaran kepemimpinan adat dengan masuknya figur-figur kompeten dari berbagai latar.¹⁹
2. Adaptasi dan Relevansi Kontemporer: Kemampuan gelar adat untuk berfungsi sebagai modal sosial dan identitas di ruang publik modern justru menjadi strategi ketahanan budaya. Dengan tetap eksis dalam percaturan ekonomi, politik, dan media, gelar adat memastikan bahwa budaya Melayu Jambi tidak terpinggirkan sebagai artefak masa lalu, tetapi tetap menjadi bagian dari percakapan masa kini.²⁰
3. Glokalisasi Identitas: Dalam konteks masyarakat urban dan global, gelar adat berfungsi sebagai anchor identity yang kuat. Bagi perantau, gelar menjadi pemersatu komunitas marga dan penanda identitas yang membedakan mereka dalam melting pot budaya nasional maupun global. Ini justru memperkuat jaringan sosial berbasis budaya.

Tantangan Keberlanjutan di Tengah Modernitas Implikasi paradoksal di atas melahirkan serangkaian tantangan konkret yang harus dihadapi untuk memastikan kelestarian yang bermakna.

1. Tantangan Otentisitas vs. Adaptasi: Tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara menjaga otentisitas makna sakral dan prosedural gelar dengan kebutuhan untuk beradaptasi agar relevan. Bagaimana merumuskan standar yang dapat menerima bentuk-bentuk baru kontribusi (misalnya dalam advokasi digital atau lingkungan) sebagai dasar pemberian gelar, tanpa mengorbankan prinsip dasar kesalehan dan pengabdian pada komunitas?
2. Tantangan Regenerasi yang Berkualitas: Regenerasi pemegang gelar tidak lagi sekadar mencari penerus berdasarkan garis darah, tetapi menemukan individu yang memiliki komitmen kultural sekaligus kapasitas untuk menjembatani dunia adat dengan realitas modern. Membangun kurikulum dan proses pendidikan adat yang sistematis bagi calon

¹⁸ R.A. Putra, "Dinamika Gelar Adat pada Masyarakat Melayu Jambi di Era Globalisasi," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 89

¹⁹ Nopriyasman, "Sistem Pemerintahan Adat Marga di Jambi Pasca Kesultanan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 2 (2021): 222

²⁰ Nelly Palmina dkk., "Gelar Adat sebagai Modal Sosial dalam Komunikasi Politik di Jambi," *Jurnal Komunikasi* 14, no. 2 (2022): 208

penerus gelar menjadi keharusan.

3. Tantangan Kelembagaan dan Legitimasi: Fragmentasi otoritas pemberi gelar antara lembaga adat formal, kerabat kesultanan, dan organisasi marga mandiri menciptakan krisis legitimasi. Diperlukan upaya untuk merumuskan tata kelola (*governance*) sistem gelar yang inklusif, transparan, dan diakui secara luas, guna mencegah konflik dan memperkuat posisi tawar adat di hadapan negara dan pasar.²¹
4. Tantangan Dokumentasi dan Digitalisasi: Untuk mengatasi dislokasi makna antargenerasi, pengetahuan yang melekat pada setiap gelar harus didokumentasikan secara komprehensif tidak hanya ritualnya, tetapi juga filsafat, kisah para penyandang terdahulu, dan kewajibannya. Digitalisasi arsip dan penciptaan konten edukatif yang menarik bagi generasi muda menjadi tantangan sekaligus peluang besar.

Kelestarian budaya masyarakat Melayu Jambi dalam konteks gelar adat tidak lagi dapat didefinisikan sebagai upaya mempertahankan kemurnian statis. Sebaliknya, kelestarian harus dimaknai sebagai kemampuan untuk mengelola perubahan secara kritis dan kreatif. Masa depan gelar adat bergantung pada kapasitas para pemangku kepentingan untuk menjawab nilai-nilai inti (seperti kebijaksanaan, pengabdian, dan kepemimpinan untuk komunitas) ke dalam bentuk dan fungsi baru yang sesuai dengan zaman, tanpa kehilangan ruhnya. Tantangannya adalah menjadikan gelar adat sebagai *living and guiding tradition*, bukan sekadar *inherited and decorative* label.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mengkaji transformasi makna dan fungsi gelar adat Melayu Jambi dalam konteks dinamika sosial modern. Berdasarkan analisis, dapat ditarik tiga kesimpulan utama.

Gelar adat telah mengalami peralihan fungsi dari suatu institusi otoritatif yang sakral menjadi suatu aset simbolis yang multifungsi. Awalnya berperan sebagai penopang utama struktur politik, hukum, dan sosial dalam kesultanan dan masyarakat marga, gelar kini lebih dominan beroperasi sebagai modal sosial (*social capital*), penanda identitas kultural, dan instrumen dalam ekonomi pasar. Pergeseran ini merefleksikan strategi adaptasi sistem budaya tradisional agar tetap eksis, meski berisiko mengurangi kedalaman makna dan tanggung jawab komunal yang inheren di dalamnya.

Transformasi tersebut dipacu oleh konstelasi faktor-faktor modern yang saling terkait. Kombinasi antara logika kapitalistik, negara-bangsa birokratis, dan revolusi digital telah menciptakan lingkungan baru yang mendorong komodifikasi, desakralisasi politik, dan mediatisasi gelar adat. Sementara itu, mobilitas sosial vertikal, pendidikan formal, dan infiltrasi nilai global (seperti individualisme dan egalitarianisme) mengubah landasan stratifikasi sosial dan kerangka berpikir masyarakat, sehingga mendorong reinterpretasi terhadap nilai hierarkis dan genealogis yang menjadi fondasi sistem gelar.

Implikasi dari perubahan ini bersifat paradoksal, sekaligus menggerus dan merevitalisasi kelestarian budaya. Di satu sisi, muncul ancaman seperti dekomposisi otoritas adat, inflasi nilai akibat komersialisasi, dan kesenjangan pemahaman antargenerasi. Di sisi lain, terbuka peluang untuk inklusivitas, relevansi kontemporer, dan

²¹ Seminar Nasional Kebudayaan Melayu Jambi 2022, sebagaimana tercatat dalam prosidingnya, hlm. 112-120.

penguatan jaringan identitas kultural, khususnya di ruang urban dan global. Tantangan keberlanjutan yang sentral adalah merumuskan keseimbangan kritis antara menjaga otentisitas nilai inti (seperti kebijaksanaan dan kepemimpinan untuk komunitas) dengan merancang mekanisme adaptasi yang relevan. Ke depannya, kelestarian gelar adat sebagai living tradition bergantung pada kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengelola perubahan ini secara reflektif, menjadikannya bukan sekadar warisan dekoratif, tetapi kerangka etis yang hidup dan membimbing masyarakat Melayu Jambi menjawab tantangan zamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, H. (2019). Dinamika kepemimpinan adat dalam masyarakat Melayu Jambi. *Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 28–42.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. (2015). Buku panduan adat istiadat Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi.
- Febriana, R. (2022). Komodifikasi adat Melayu Jambi dalam Festival Pesona Sungai Batanghari. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1), 32–45.
- Hanafiah, M. A., Radjab, M., & Thalib, A. (1993). Filsafat hidup orang Jambi. Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.
- Husnu Abadi, Y., Thalib, M., & M. Ali, H. (2003). Adat istiadat Melayu Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi.
- Lembaga Adat Provinsi Jambi. (2010). Pokok-pokok hukum adat pemerintahan marga di Jambi. Lembaga Adat Provinsi Jambi.
- Nopriyasman. (2021). Sistem pemerintahan adat marga di Jambi pasca kesultanan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 210–225. <https://doi.org/10.24198/jsh.v10i2.33456>
- Novayanti, R. (2020). Kedudukan perempuan dalam sistem gelar adat Melayu Jambi: Studi gelar Rio. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 10(2), 153–168. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i2.425>
- Palmina, N., Suryadi, & Syaifullah. (2022). Gelar adat sebagai modal sosial dalam komunikasi politik di Jambi. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 191–210. <https://doi.org/10.36080/jk.v14i2.1789>
- Putra, R. A. (2020). Dinamika gelar adat pada masyarakat Melayu Jambi di era globalisasi. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 78–95. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p78-95.2020>
- Risno. (2018). Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Melayu Jambi [Tesis magister hukum, Universitas Jambi]. Repositori Universitas Jambi. <http://repository.unja.ac.id/id/eprint/4890>
- Samin, S. M. (2001). Seloko adat Melayu Jambi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi.
- Sushartami, W. (2018). Nilai spiritual dalam upacara adat Melayu Jambi. *Jurnal Melayu: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kemanusiaan*, 15(1), 84–95.
- Syarifuddin, S. (2022). Konsep kedaulatan dalam masyarakat adat Minangkabau dan Melayu Jambi: Sebuah tinjauan komparatif. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 8(2), 108–122.
- Warsidi, E., & Nurkhan, M. (2010). Adat istiadat Melayu Jambi: Kajian nilai-nilai budaya. Kantor Bahasa Provinsi Jambi.
- Zulkifli. (2019). Eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Melayu Jambi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 237–256. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.237-256>